BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan teoritis yang dilengkapi dengan konsep-konsep dasar dan penelitian terdahulu mengenai perataan laba dan variabel-variabel yang mempengaruhinya yang membantu dalam proses pembentukan kerangka pemikiran dan selanjutnya digunakan dalam merumuskan hipotesis dengan maksud memberikan pemahaman mengenai penelitian ini.

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

Asimetri informasi antara manejemen (*agent*) dan pemilik perusahaan (*principal*) memberikan kesempatan bagi manajer untuk bertindak oportunitis, yaitu demi memperoleh keuntungan pribadi (Ujiyantho dan Pramuka, 2007).

2.1.1 Teori Keagenan

Perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dan kepemilikan akan rentan terhadap konflik keagenan (Jensen and Mackling, 1976 dalam Sunarto, 2009). Teori yang berkembang tahun 1970-an ini membahas hubungan kontraktual antara anggota-anggota perusahaan yang berawal dari adanya bentuk korporasi yang memisahkan secara tegas antara pemilik perusahaan dengan manajemen (Dewi, 2012). Hal yang mendasari konsep teori keagenan muncul dari perluasan dari satu individu pelaku ekonomi informasi menjadi dua individu (Hendriksen dan Van Breda, 2002). Salah satu individu menjadi agen untuk *principal*. *Principal* mempekerjakan agen untuk melakukan tugas untuk kepentingan *principal* termasuk pendelegasian otoritas pengambilan keputusan dari *principal* ke agen yang dianalogikan seperti

antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan (Hendriksen dan Van Breda, 2002).

Para pemilik disebut evaluator informasi dan agen-agen mereka disebut pengambil keputusan (Hendriksen dan Van Breda, 2002). Agen berusaha memaksimumkan *fee* kontraktual yang diterimanya tergantung pada tingkat upaya yang diperlukan sedangkan *principal* berusaha untuk memaksimumkan *returns* dari penggunaan sumber dayanya tergantung pada *fee* yang dibayarkan pada agen (Belkaoui dan Ahmed, 2007). Konflik kepentingan ini semakin meningkat terutama karena *principal* tidak dapat memonitar aktivitas agen untuk memastikan bahwa agen bekerja sesuai dengan kepentingan *principal* (Dewi, 2012).

Eisenhardt (1989) dalam Syahfandi (2012). menyatakan bahwa teori keagenan menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu manusia pada umumnya menguntungkan diri sendiri (*self interest*), manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rasionality*), dan manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Agen mempunyai lebih banyak informasi internal perusahaan. Sedangkan *principal* tidak memiliki informasi yang cukup mengenai keadaan perusahaan keseluruhan. Ketidakseimbangan informasi ini disebut asimetri informasi (*asymmettric information*) yang kemudian dimanfaatkan para manajer untuk memanipulasi laporan keuangan. Salah satu cara yang dapat menyelaraskan tujuan prinsipal dan agen adalah melalui mekanisme pelaporan (Pudyastuti, 2009 dalam Syahfandi, 2012). Yaitu laporan keuangan sebagai produk akhir akuntansi keuangan yang menginformasikan profitabilitas perusahaan yang pada umumnya dipakai untuk mengukur kinerja perusahaan (Penman, 2003).

2.1.2 Perataan Laba

Besarnya profitabilitas memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi: aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, dan arus kas. Selanjutnya, dinyatakan bahwa perusahaan harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas.

Sesuai dengan *agency theory*, motivasi manajemen akrual dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori: *opportunistic* dan *signaling* (Beaver, 2002). Pada motivasi *opportunistic*, manajemen melalui kebijakan *aggressive accounting* menghasilkan angka laba lebih tinggi daripada laba yang sesungguhnya. Apabila laporan laba tidak dapat menggambarkan laba yang sesungguhnya, maka laporan laba mengarah pada *overstate earnings*. Laba yang mengarah pada *overstate earnings* mengakibatkan laba menjadi kabur (*opaque*). Motivasi *opportunistic* yang dilakukan oleh manajemen berhubungan dengan kompensasi berdasarkan kontrak yang disepakati dengan pihak pemilik.

Pada motivasi *signaling*, manajemen menyajikan informasi keuangan (khususnya laba) diharapkan dapat memberikan sinyal kemakmuran kepada para pemegang saham. Laporan laba yang dapat memberikan sinyal kemakmuran adalah laba yang relatif tumbuh dan stabil (*sustainable*). Penman dan Zhang (2002)

menyatakan bahwa *sustainable earnings* adalah laba yang mempunyai kualitas tinggi dan sebagai indikator future earnings; dan selanjutnya disebut sebagai persistensi laba (Sloan, 1996; Dechow dan Dichev, 2002; Francis, LaFond, Olsson dan Schipper, 2004).

Berdasarkan PSAK No. 1 dan pernyataan Beaver (2002) dapat dinyatakan bahwa manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen lebih banyak didasarkan pada manajemen akrual, dan lebih khusus lagi akrual diskresi. Kebijakan akrual diskresi yang dilakukan oleh manajemen membawa dua konsekuensi. Pertama, jika kebijakan tersebut membawa keinformasian laba, maka kebijakan tersebut akan meningkatkan kualitas laba, sehingga laba semakin persisten. Kedua, jika kebijakan tersebut tidak membawa keinformasian laba (*uninformative earnings*), maka kebijakan tersebut akan menurunkan kualitas laba, sehingga laba menjadi kabur (*opaque*).

Pada teori keagenan, manajemen menyajikan laporan keuangan dapat dimotivasi oleh dua motivasi: *opportunistic* dan *signaling*. Motivasi tersebut mendorong manajemen melakukan manajemen laba (*earnings management*). Pada motivasi *opportunistic*, manajemen cenderung manyajikan laba lebih tinggi daripada yang sesungguhnya, karena berhubungan dengan kompensasi. Sementara pada motivasi *signaling*, manajemen cenderung menyajikan laba yang mempunyai kualitas, karena berhubungan dengan evaluasi kinerja dan selanjutnya digunakan sebagai sinyal kepada para pemegang saham.

Salah satu pola dari manajemen laba adalah perataan laba (Cahan, 2008). Penjelasan konsep manajemen laba menggunakan teori keagenan dan teori akuntansi

positif yang saat ini. dikenal dengan *creative accounting, earning management* menurut Fudenberg dan Tirole (1995) dalam Subhekti (2008), perataan laba adalah proses manipulasi waktu terjadinya laba atau laporan laba agar laba yang dilaporkan kelihatan stabil. Praktik manajemen laba banyak mengundang kontroversi karena disatu sisi praktik ini tidak menyalahi aturan, namun. banyak juga pihak yang menilai praktik manajemen laba sebagai perbuatan yang melanggar prinsip akuntansi. Seperti dikemukakan oleh Poll (2004) bahwa:

> *"The practice of earnings management is facilitated in the flexibility of GAAP as well as the many possible interpratations of some of the principles put forward in GAAP"*

Namun Wild *et al.* (2001) dalam Poll (2004) menyatakan bahwa:

> *"Earnings management is a purposeful intervention by management in the earning determination process, usually to satisfy selfish objectives"*

Pernyataan ini didukung oleh pernyataan Levitt (2004) dalam Subhekti (2008) bahwa manajemen laba didefinisikan sebagai. suatu praktek pelaporan *earnings* yang lebih merefleksikan keinginan manajemen daripada performa keuangan perusahaan.

Menurut Hepworth (1953) yang didukung Ashari, dkk (1994) dan Zuhroh (1996) dalam Jatiningrum (2000), bahwa tindakan perataan laba merupakan tindakan yang logis dan rasional bagi manajer untuk meratakan laba dengan menggunakan cara atau metode akuntansi tertentu, alasannya antara lain pertama, rekayasa untuk mengurangi laba dan menaikkan biaya pada periode berjalan dapat mengurangi hutang pajak. Kedua, tindakan perataan laba dapat meningkatkan kepercayaan investor, karena mendukung kestabilan penghasilan dan kebijakan deviden sesuai

dengan keinginan. Ketiga, tindakan perataan laba dapat mempererat hubungan antara manajer dan karyawan, karena dapat mengindari permintaan kenaikan upah/gaji oleh karyawan/pekerja. Dan keempat, tindakan perataan laba memiliki dampak psikologis pada perekonomian, dimana kemajuan dan kemunduran dapat dibandingkan dan gelombang optimisme dan pesimisme dapat ditekan.

Imainir (1993) seperti dikutip dari Kikky (2002) melakukan penelitian faktor-faktor pendorong perataan laba pada perusahaan di Indonesia dengan menggunakan sebanyak 15 sampel perusahaan yang terdaftar di BEJ. Hasilnya menunjukkan bahwa harga saham, perbedaan laba aktual dan laba normal, serta kebijakan akuntansi mengenai laba terbukti sebagai faktor yang mempengaruhi perataan laba.

Moses (1987), Albrecht dan Richardson (1990) dalam Ariyani (2004) membuktikan bahwa ukuran perusahaan, kelompok usaha (sektor industri) menunjukkan adanya asosiasi dengan perataan laba. Tetapi Ashari (1994) Jin dan Machfoedz (1998), dan Priyo (2001) tidak membuktikan bahwa hal-hal tersebut sebagai faktor yang mempengaruhi perataan laba. Ilmainir (1993) seperti yang dikutip Kiky (2002) menunjukkan hasil yang sama yaitu tidak berpengaruhnya ukuran perusahaan terhadap perataan laba. Menurut pendapatnya, perbedaan ini kemungkinan disebabkan karena adanya perbedaan perlakuan pemerintah antara negara maju dan negara berkembang.

Sedangkan Archibald (1967), Carlson dan Chenchuramaiah (1997), Ashari (1994) dalam penelitiannya mereka membuktikan salah satu variabel diantaranya profitabilitas perusahaan yang merupakan faktor yang mempengaruhi perataan laba.

Tetapi Zuhroh (1996), Jin dan Machfoedz (1998) tidak berhasil membuktikan profitabilitas, mereka hanya membuktikan bahwa *leverage* operasi adalah sebagai faktor yang berpengaruh terhadap praktik perataan laba yang dilakukan perusahaan di Indonesia. Sedangkan Jatiningrum (2000) mencoba menguji faktor sektor industri sebagai variabel penelitiannya, namun penelitiannya tidak berhasil menunjukkan bukti bahwa sektor industri merupakan faktor pendorong dilakukannya tindakan perataan laba. Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian Ashari, dkk (1994). Hermawan (1997) dengan sampel perusahaan publik sektor industri manufaktur yang terdaftar di BEJ serta Priyo (2001) dalam penelitiannya dengan 313 sampel perusahaan di ASEAN, membuktikan ukuran perusahaan, *dividen payout*, *debt equity ratio* serta nasionalitas perusahaan sebagai faktor-faktor yang tidak mempengaruhi perataan laba. Ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Deefond dan Jiambalvo (1994), Sweeney (1994) yang tidak membuktikan bahwa *dividen payout ratio, debt equity ratio* sebagai faktor yang mempengaruhi perataan laba.

White (1970), Moses (1987), Beattie (1993), dan Houilthausen (1995) seperti yang dikutip Salmawi dan Bambang Sudibyo (1999) dalam Ariyani (2004) meneliti tentang tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan praktik perataan laba. Kikky (2002) melakukan penelitian tentang ada tidaknya perataan laba pada lembaga keuangan non bank dan faktor-faktor yang mempengaruhi perataan laba. Dari hasil penelitiannya tersebut terbukti bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi praktik perataan laba, tetapi *debt equity ratio* serta profitabilitas tidak terbukti mempengaruhi perataan laba.

Albercht dan Richardson (1999) menyatakan bahwa terdapat tiga pendekatan dalam studi yang berkaitan dengan perataan laba. Ketiga pendekatan tersebut adalah:

1. *The classical approach*. Pendekatan ini digunakan untuk menguji hubungan antara variabel-variabel yang dapat digunakan untuk melakukan penstabilan laba dan pengaruhnya terhadap laba yang dilaporkan.
2. *The income variability approach*. Pendekatan ini digunakan untuk membedakan tindakan/perilaku manajemen yang dapat menyebabkan timbulnya penstabilan laba secara *artificial* dengan peraturan yang bersiat real dan natural.
3. *The dual economy approach*. Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan perubahan laba operasi dan laba normal dengan perubahan-perubahan biaya pada perusahaan-perusahaan berdasarkan sektor-sektor tertentu (di Amerika Serikat terdapat dua sektor yaitu *core* dan *periphery sector). Core sector* terdiri dari durabel *manufacturing* dan industri yang mengolah hasil alam. *Peripheri sector* terdiri dari industri pertanian, *non durable manufacturing*, dan industri eceran.

Berbagai teknik yang digunakan dalam perataan laba diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perataan melalui waktu terjadinya transaksi atau pengakuan transaksi melalui kebijakan manajemen itu sendiri *(accrual*), misalnya: pengeluaran biaya riset dan pengembangan. Selain itu banyak juga perusahaan yang menerapkan kebijakan diskon dan kredit sehingga hal ini dapat menyebabkan meningkatnya jumlah piutang dan penjualan pada akhir bulan terakhir tiap kuarter, sehingga laba

kelihatan stabil pada periode tertentu.

2. Perataan melalui alokasi untuk beberapa periode tertentu. Manajer memiliki kewenangan untuk mengalokasikan pendapatan dan atau beban untuk periode tertentu. Misalnya, jika penjulan meningkat maka manajemen dapat membebankan biaya riset dan penelitian serta amortisasi *goodwill* pada periode itu untuk mensabilkan laba.
3. Perataan melalui klasifikasi. Manajemen memiliki kewenangan dan kebijakan sendiri untuk mengklasifikasikan pos-pos rugi laba dalam katagori yang berbeda. Misalnya, jika pendapatan operasi sulit untuk didefenisikan maka manajer dapat mengklasifikasikan pos itu pada pendapatan operasi atau pendapatan non operasi. Dalam hal ini dapat digunakan sewaktu-waktu untuk meratakan laba melihat kondisi pendapatan periode itu.

Teknik-teknik itu memang mungkin untuk dilakukan karena Prinsip Akuntasi Berterima Umum (PABU) memberikan berbagai pilihan dalam mencatat berbagai peristiwa keuangan. Manajemen memiliki keleluasan untuk mengganti satu metode ke metode lain. Keleluasan untuk memakai teknik-teknik akuntansi dalam mencatat terbukti telah disalahgunakan oleh manajemen untuk melakukan perataan laba. Bahkan Koch (1981) mensinyalir bahwa perataan laba banyak dilakukan dengan mengunakan teknik-teknik akuntansi yaitu dengan merubah kebijakan akuntansi. (Sopa Sugiarto, 2003)

Koch (1981) Menyatakan bahwa peratan laba dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. *Artificial smoothing*, perataan laba yang mengacu pada prosedur akuntansi yang

diimplementasikan dimana manajemen melakukan tindakan untuk mengakui biaya dan atau pendapatan dari satu periode ke periode lain (manipulasi melalui metode akuntansi).

2. *Real smoothing*, Perataan laba yang mengacu pada transaksi aktual yang dilakukan oleh entitas dimana manajemen mempunyai kendali terhadap transaksi yang akan mempengaruhi laba di masa depan (manipulasi melalui transaski).

Adapun yang dapat dijadikan sebagi sasaran praktik peratan laba adalah aktivitas-aktivitas yang dapat digunakan oleh manajemen untuk mempengaruhi aliran data atau informasi. Untuk menciptakan laporan keuangan yang sesuai dengan keinginan manajemen, manejer dapat memasukkan informasi yang akan datang kedalam laporan periode ini atau sebaliknya (Priyo, 2001 dalam Ariyani, 2004).

Seperti yang dikutip dari Jin dan Machfoedz (1998) instrumen yang dapat digunakan dalam perataan laba antara lain adalah pendapatan, deviden, perubahan dalam kebijakan akuntansi, biaya pensiun, pos luar biasa, kredit pajak investasi, depresiasi dan biaya tetap, perubahan mata uang, klasifikasi akuntansi dan pencadangan.

Foster (1986) mengklasifiksikan unsur-unsur laporan keuangan yang dijadikan dalam praktik perataan laba, yaitu;

1. Unsur Penjualan
    a. Saat pembuatan faktur. Misalnya: penjualan yang sebenarnya untuk periode yang akan datang pembuatan fakturnya dilakukan pada periode ini dan dilaporkan sebagai penjualan periode ini.
    b. Pembuatan pesanan atau penjulan fiktif.

c. *Downgrading* (penurunan) produk. Misalnya dengan cara mengklasifikasikan produk yang belum rusak kedalam kelompok produk yang rusak dan selanjutnya dilaporkan telah terjual dengan harga yang lebih rendah dari harga yang sebenarnya.

2. Unsur Biaya

a. Memecah faktur. Misalnya faktur untuk sebuah pembelian/pesanan dipecah menjadi beberapa pembelian/pesanan dan selanjutnya dibuatkan beberapa faktur dengan tanggal berbeda kemudian dilaporkan dalam beberapa periode akuntansi.

b. Mencatat *prepayment* (biaya dibayar dimuka) sebagai biaya. Misalnya melaporkan biaya advertensi dibayar dimuka untuk tahun depan sebagai biaya advertensi tahun ini.

2.1.3 Perbankan Syariah

Menurut Muhammad (2005) pengertian bank syariah dijelaskan sebagai berikut:

> "Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Atau dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah."

Hal ini juga dijelaskan Siamat, Dahlan (2004) bahwa bank syariah adalah yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip prinsip hukum atau syariah dengan mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadist.

Berdasarkan Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bab 1 pasal 1, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah. Bank umum syariah adalah bank yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sebaliknya bank pembiayaan syariah tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran (Yaya, dkk., 2009).

Akuntansi dalam hukum Islam berhubungan dengan pengakuan, pengukuran dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak dan kewajiban secara adil (Harahap, dkk., 2006). Seperti tercantum dalam Surat Al Baqarah ayat 282:

> "Hai, orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar".

Pada ayat lain Allah juga telah berfirman:

> "Celakalah bagi orang-orang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menimbang atau menakar untuk orang lain, mereka kurangi" (QS Al Muthaffifin: ayat 1-3).

Bank Syariah memiliki fungsi sebagai:

1. Manajer investasi;

   Bank Syariah dapat mengelola investasi atas dana nasabah dengan meng-gunakan akad Mudharabah atau sebagai agen investasi;

2. Investor;

Bank Syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan Syariah. Keuntungan yang diperoleh dibagi secara proporsional sesuai nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana;

3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran;

   Bank Syariah dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan seperti bank non-syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;

4. Pengemban fungsi sosial

   Bank Syariah dapat memberikan pelayanan sosial dalam bentuk pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah serta pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*) sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS), dalam Standar Akuntansi Keuangan (2009), aktifitas perbankan syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai *amanah* (kepercayaan ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh ummat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (*al falah*). Untuk itu transaksi syariah berasaskan prinsip: persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan (*'adalah*), kemaslahatan (*maslahah*), keseimbangan (*tawazun*), dan universalisme (*syumuliyah*).

Ada pula ciri-ciri umum Bank Syariah seperti berikut ini :

- Beban biaya yang telah disepakati pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnyan tidak kaku dan dapat ditawar dalam batas yang wajar.

- Penggunaan prosentasi dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindarkan. Karena persentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun utang pada batas waktu perjanjian telah berakhir.
- Didalam kontrak pembiayaan proyek bank tidak menetapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti (*Fixed Return*) yang ditetapkan dimuka. Bank Syari'ah menerapkan sistem berdasarkan atas modal untuk jenis kontrak al mudharabah dan al musyarakah dengan sistem bagi hasil (*Profit and losery*) yang tergantung pada besarnya keuntungan.
- Pengarahan dana masyarakat dalam bentuk deposito atau tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadi'ah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai pernyataan dana pada proyek yang dibiayai oleh bank sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah hingga kepada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti (*fixed return*).
- Bank Syari'ah tidak menerapkan jual beli atau sewa-menyewa uang dari mata uang yang sama dan transaksinya itu dapat menghasilkan keuntungan. Jadi mata uang itu dalam memberikan pinjaman pada umumnya tidak dalam bentuk tunai melainkan dalam bentuk pembiayaan pengadaan barang selama pembiayaan, barang tersebut milik bank.
- Adanya dewan Syari'ah yang bertugas mengawasi bank dari sudut Syari'ah. Bank Syari'ah selalu menggunakan istilah-istilah dari bahasa arab dimana istilah tersebut tercantum dalam *fiqih* Islam.
- Adanya produk khusus yaitu pembiayaan tanpa beban murni yang bersifat sosial,

dimana nasabah tidak berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan (*al-qordul hasal*) .

- Fungsi lembaga bank juga mempunyai fungsi amanah yang artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang telah dititipkan dan siap sewaktu-waktu apabila dana ditarik kembali sesuai dengan perjanjian.

Karakteristik akuntansi syariah memiliki banyak kesamaan dengan konsep akuntansi pada umumnya. Selain memiliki tujuan yang sama, akuntansi syariah juga memiliki karakteristik kualitatif informasi yang sama dengan akuntansi umum. Prinsip utama yang membedakan keduanya adalah adanya aturan syariah yang harus dipatuhi dalam akuntansi syariah. Perbedaan lainnya dapat dilihat dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perbedaan Postulat Akuntansi Konvensional dengan Akuntansi Syariah

Postulat/ Prinsip	**Akuntansi Konvensional**	**Akuntansi Syariah**
Entitas	Pemisahan antara bisnis dan pemilik	Entitas didasarkan pada pembagian laba firma, tidak memiliki kewajiban terpisah
Going Concern	Bisnis terus beroperasi sampai tujuan tercapai	Kelangsungan usaha tergantung pada kontrak persetujuan antara pihak yang terlibat dalam kegiatan bagi hasil
Periode	Akuntansi tidak dapat menunggu sampai akhir kehidupan perusahaan untuk mengukur sukses perusahaan	Tahun Hijriyah untuk perhitungan zakat terkecuali untuk sektor pertanian berdasarkan musim panen
Unit	Pengukuran Nilai moneter	Kuantitas atau harga pasar untuk ternak, barang pertanian dan emas untuk memenuhi

		kewajiban zakat
Full Disclosure	Untuk tujuan pengambilan keputusan	Untuk menunjukkan kewajiban kepada Allah, sosial, dan individual
Objektivitas	Kepercayaan terhadap pengukuran yaitu bebas dari segala bias subyektif	Seperti sifat *Rahman* yaitu kesadaran bahwa kita memenuhi kewajiban keuangan dan non-keuangan untuk Ridho Allah.
Materialitas	Berkaitan dengan kepentingan informasi terhadap pengambilan keputusan	Berkaitan dengan pengukuran yang adil, pemenuhan kewajiban kepada Allah, sosial dan Individual
Konsistensi	Catat dan laporkan sesuai GAAP	Mencatat dan Melaporkan secara konsisten berdasarkan prinsip syariah
Konservatisme	Memiliki teknik akuntansi yang memberikan pengaruh paling kecil terhadap pemilik	Memiliki teknik akuntansi yang paling menguntungkan masyarakat, misalnya memilih angka yang lebih besar untuk pembayaran zakat

Sumber: Menuju Perumusan Teori Akuntansi Syariah, Harahap (2001) dalam Syahfandi (2012)

Perbedaan juga terlihat dari elemen-elemen laporan keuangan, dimana bank syariah memiliki asas dan berbagai macam transaksi khusus yang tidak ada dalam akuntansi pada umumnya. Dalam KDPPLKS paragraf 68 unsur-unsur laporan keuangan bank syariah terbagi atas:

1. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial meliputi laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas.
2. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial. komponen ini

meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat.

3. Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan tanggung jawab khusus entitas syariah.

Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perbedaan Laporan Keuangan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Laporan Keuangan Bank Syariah	Laporan Keuangan Bank Konvensional
1. Neraca 2. Laporan Laba Rugi 3. Laporan Arus Kas 4. Laporan Perubahan Ekuitas 5. Catatan atas Laporan Keuangan 6. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat 7. Laporan Sumber dan Penggunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah 8. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan (*Qardhul Hasan*) 9. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil	1. Neraca 2. Laporan Laba Rugi 3. Laporan Arus Kas 4. Laporan Perubahan Ekuitas 5. Catatan atas Laporan Keuangan

Sumber : PSAK 101, dan PSAK 31,

Tujuan laporan keuangan pada sektor perbankan syariah adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan aktivitas operasi bank yang bermanfaat dalam pengambilan putusan.

2.1.4 Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Menurut Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 5/9/PBI/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Bagi Bank Syariah, Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar

persentase tertentu dari jumlah kredit berdasarkan penggolongan kualitas aktiva produktif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Secara khusus tata-cara pembentukan PPAP sebagaimana yang dijelaskan dalam PBI No. 5/9/PBI/2003 sebagai berikut:

1. cadangan umum PPAP ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1 % dari seluruh aktiva produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk SWBI dan surat utang pemerintah.
2. cadangan khusus PPAP ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar :
    a. 5% dari aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus
    b. 15% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan.
    c. 50% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan.
    d. 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan.
3. cadangan khusus PPAP untuk piutang ijarah yang digolongkan dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet ditetapkan sekurang-kurangnya 50% dari masing-masing kewajiban pembentukan PPAP.

Penggunaan PPAP telah bergeser dari tujuan awalnya, yaitu untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam kegiatannya. Perataan laba menggunakan cadangan (PPAP) bertujuan agar laba yang dilaporkan perusahaan pada periode berjalan tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Cadangan (PPAP) merupakan bagian dari modal tambahan yang termasuk bagian yang penting dan sah

dari modal dasar suatu bank. Hingga pada saat apabila menginginkan labanya menjadi lebih tinggi dari laba sesungguhnya, maka perusahaan (bank) dapat menggunakan cadangan tersebut untuk mengatur laba sesuai kepentingannya (Sulistyanto, 2008).

2.1.5 Hasil Penelitian Terdahulu

Perataan laba melalui PPAP telah dibuktikan Perez *et al*. (2011). Dalam penelitian tersebut, diperoleh hasil bahwa PPAP dipengaruhi oleh profitabilitas bank dan resiko kredit. Mengingat bahwa kelangsungan usaha bank antara lain tergantung dari kemampuan bank untuk mengantisipasi potensi kerugian atas pembiayaan, bank wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif berupa cadangan umum dan cadangan khusus setiap melakukan pembiayaan (Nurkhosidah, 2009). Tingginya pembentukan PPAP sangat ditentukan oleh kualitas pembiayaan. Pembiayaan yang tidak produktif akan menyebabkan tingginya PPAP yang harus dibentuk yang akan mempengaruhi persepsi nasabah yang pada akhirnya akan mempengaruhi profitabilitas perbankan.

Kegiatan hapus tagih terhadap pembiayaan yang benar-benar sudah tidak dapat ditagih kembali akan mengurangi volume PPAP dan semakin besar PPAP akan mengurangi modal karena PPAP dibentuk dari modal (Hasibuan, 2004). Bank yang mengalami kekurangan modal, profitabilitasnya akan terganggu karena modal berfungsi menunjang kegiatan operasional usaha bank. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa profitabilitas dan PPAP saling berhubungan.

Perataan laba melalui PPAP juga dibuktikan oleh Ahmed, Takeda dan Thomas (1999). Dalam penelitian tersebut, diperoleh hasil bahwa PPAP dipengaruhi oleh risiko kredit, laba, dan kondisi ekonomi. Risiko kredit merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap PPAP.

Menurut Bastian, Indra dan Suhardjono (2006), risiko kredit adalah suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman dari bank beserta bunganya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan. Pada dasarnya, seluruh kredit memiliki risiko kredit bagi bank. Namun kredit yang memiliki risiko paling besar adalah kredit yang termasuk golongan *non performing financing* (NPF). Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, kredit yang termasuk golongan *non performing financing* adalah kredit kurang lancar, diragukan, dan macet.

Menurut Widyaningdyah (2001), *leverage* (*debt*) merupakan rasio antara total utang dengan total asset (*debt to assets ratio*/DAR) yang menunjukkan berapa bagian aktiva yang digunakan untuk menjamin utang. Ukuran ini berhubungan dengan keberadaan dan ketat tidaknya suatu persetujuan utang. Perusahaan yang mempunyai rasio *leverage* tinggi akibat besarnya utang disbanding dengan aktiva yang dimiliki perusahaan diduga melakukan *earning management* karena perusahaan terancam *default* yaitu tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang pada waktunya.

Tabel berikut ini menyajikan hasil penelitian sebelumnya mengenai perataan laba dan PPAP:

Tabel 2.3
Ringkasan Penelitian Empiris tentang PPAP

Peneliti	Sampel	Variabel	Hasil
Furfine (2000)	Bank Komersial di Amerika antara September 1989-Desember 1997	Data Kuartalan digunakan untuk menyusun estimasi dampak perubahan persyaratan modal terhadap pertumbuhan kredit bank dan rasio modal	Secara formal dan empiris terdapat korelasi antara gejolak modal bank dengan penurunan jumlah aktiva produktif
Lobo dan Yang (2001)	1658 observasi tahun-bank periode 1980-1997	Motif utama manajer melakukan manajemen laba diuji dengan cara: *firm specific, time series, cross section* dan panel data	Terbukti *opportunistic hipothesis,* menggunakan penyisihan penghapusan produktif memenuhi permodalan adanya manajer aktiva untuk regulasi
Laeven dan Majnoni (2002)	1419 bank, 8176 *bank-years observations* di 45 negara	*LLP, earnings, Loan growth, Gross Domestic Product growth*	LLP berpengaruh terhadap *income* dan modal
Hodder, KohlBeck dan McAnally (2002)	230 bank publik amerika (1993- 1998)	*Assets risk categories, macro economic variable* (*unemployment rate, Treasury bond rate)*	Bank menggunakan sekuritas sejalan dengan risiko yang diinginkan dan risiko penurunan modal
Hasan dan Wall (2003)	Bank Amerika dan tiga sampel non Amerika yang masuk dalam Bank Scope mencakup 7500 bank per tahun	Determinan cadangan kerugian kredit bank, determinan fundamental, (nondiskresi) komponen cadangan seperti NPL dan determinan diskresi	Cadangan kerugian kredit sensitif terhadap laba sebelum PPAP di hampir semua sampel. Namun beberapa variabel seperti *net charge-off* tidak signifikan

		seperti laba sebelum PPAP	
Kanagaretnam, Lobo dan Mathieu, (2003)	491 bank, 4166 observasi kuartalan bank di Amerika periode 1987-2000	Manajemen laba diukur dengan PPAP, CAR, EBTP	Manajer menyimpan laba melalui PPAP tidak berhubungan dengan tingkat modal.
Karaoglu, Emre (2004)	249 *holding company bank*, 1247 *banks quarter observation* di US (1997-2000)	*Loan sales, book value, market value of securitization*	Bank menggunakan *gains loan sales* dan *securitization* untuk mempengaruhi dan regulasi modal laba
Zoubi, Taisier A. dan Al-Khazali O. (2007)	47 Bank Syariah dunia pada tahun 2000-2003	ROA, LLP, DER, dan other Reserve	LLP digunaka bank Syariah sebagai alat manajemen laba.
Boulila, Nelila, Sarra Ben Slama, dan Abdelkader Boudriga (2010)	66 Bank Syariah dunia pada tahun 2001-2006	*Beidlemen's and Eckel's Coefficient,* LLP, NPL, TL, EBTP.	Bank Syariah secara umum tidak menggunakan LLP sebagai alat manajemen laba.

Sumber : Berbagai Jurnal

2.2 Kerangka Pemikiran

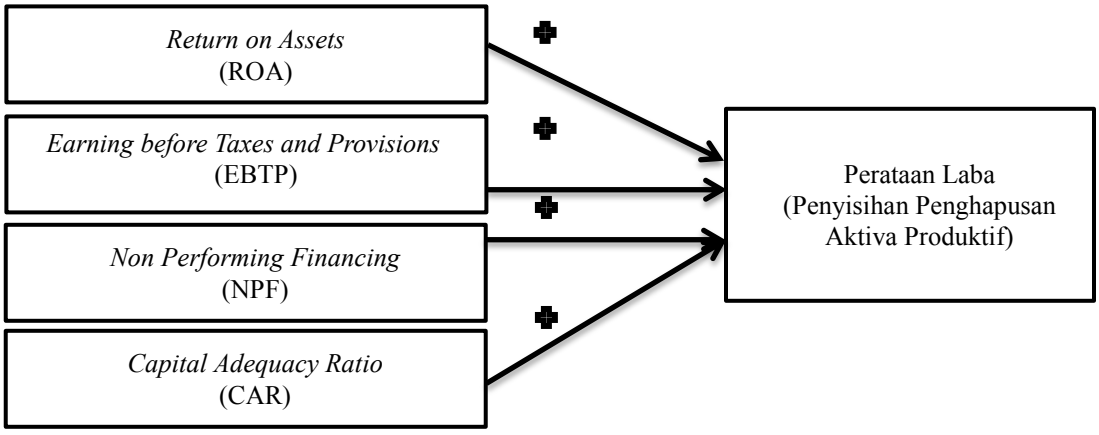
Dalam subbab ini akan dipaparkan beberapa alasan yang mendasari perumusan kerangka penelitian dan visualisasi kerangka penelitian di jelaskan dalam bentuk gambar. Berdasarkan telaah pustaka serta penelitian terdahulu, penelitian ini menjelaskan kemungkinan manajemen laba dengan penyisihan pengurangan aktiva produktif yang dilakukan bank syariah. Indeks Eckel digunakan untuk menguji apakah bank syariah melakukan perataan laba atau tidak. Indeks Eckel didapat

dengan membandingkan koefisien variasi dari perubahan laba bersih (*net income*) dengan koefisien variasi dari perubahan jumlah pendapatan operasional (*total sales*), dimana angka indeks Eckel yang kurang dari 1 diklasifikasikan sebagai perata laba (*income smoother*), dan sama dengan atau lebih dari satu diklasifikasikan sebagai bukan perata laba (Kustono, 2010).

Selanjutnya, pengujian atas faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba dilakukan. Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA) dan *Earning before Taxes and Provisions* (EBTP), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) diduga mempengaruhi praktik perataan laba dengan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP).

Untuk memahami penelitian ini, dari landasan teori yang telah dijelaskan sebelumnya disusun hipotesis sebagai alur pemikiran penelitian yang kemudian digambarkan dalam kerangka teoritis sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis

Pendekatan teori keagenan (*agency theory*) menyatakan bahwa praktek earnings management dipengaruhi oleh konflik antara kepentingan manajemen (*agent*) dan pemilik (*principal*) yang timbul karena setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertimbangkan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya. (Sulistyanto, 2008). Secara syariah tidak diperkenankan adanya praktik manajemen laba. Hal ini sesuai dengan surat Al Baqoroh ayat 282:

> "Hai, orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar" (QS Al Baqoroh ayat 282).

Namun demikian, Fatwa Dewan Syariah Nasional No.14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah menyebutkan bahwa untuk kemaslahatan dalam pencatatan (laporan keuangan) sebaiknya digunakan sistem akrual basis, meskipun juga disebutkan bahwa dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (*Cash Basis*). Berdasarkan PSAK No. 101 tentang Akuntansi Bank Syariah, diambil asumsi dasar konsep akuntansi bank syariah sama dengan asumsi dasar konsep akuntansi keuangan secara umum yaitu konsep kelangsungan usaha (*going concern*) dan dasar akrual.

Basis akrual secara khusus digunakan dalam pencatatan beban, sedang untuk pendapatan harus dilakukan secara hati-hati tergantung dari opini dewan syariah setempat apakah menggunakan dasar kas atau akrual. Penggunaan dasar kas mengacu pada prinsip kehati-hatian yang berlandaskan ajaran Islam yang mengatakan

bahwa apa yang akan terjadi esok hari adalah *ghaib* sehingga tidak seharusnya mengakui pendapatan (rezeki) sebelum nyata–nyata berbentuk aliran kas yang secara riil masuk ke bank (Baraba, 2010). Pada standar akuntansi bank syariah seperti untuk tagihan *murabahah*, keuntungan diakui pada saat akad ditandatangani jika masa kredit tidak melewati satu periode laporan keuangan sedang bila masa kredit melewati satu periode laporan keuangan baik dalam bentuk *lumpsum* maupun *installment* maka pengakuan pendapatan harus proporsional secara akrual kecuali dewan pengawas syariah menetapkan secara kas atau ketika angsuran/cicilan diterima (Baraba, 2010).

Padahal selama ini prinsip dasar akrual sering digunakan untuk kepentingan manajemen laba (akrual ini disebut akrual kelolaan atau akrual diskresioner). Konsep akrual ini memungkinkan dilakukannya rekayasa laba atau earning management oleh manajer untuk menaikkan atau menurunkan angka akrual dalam laporan laba rugi (Masodah, 2007). Perekayasaan laba juga dapat dilakukan dengan mendistorsi laba dengan cara menggeser periode pengakuan biaya dan pendapatan (Tobing dan Nur, 2009). Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Bank syariah melakukan praktik manajemen laba dengan menggunakan pola perataan laba (income smoothing).

Penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) merupakan salah satu akun dalam perbankan yang memiliki kecenderungan manipulasi yang cukup besar. Nilai penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) mengukur tingkat efisiensi dan biaya bank dalam membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)

untuk menutup kemungkinan risiko yang terjadi karena tidak tertagihnya fasilitas kredit atau bentuk investasi aktiva produktif lain. Semakin besar PPAP berarti semakin besar estimasi terhadap timbulnya kredit yang bermasalah sekalipun di pihak lain hal ini mencerminkan kemampuan bank untuk menanggulangi kemungkinan tersebut.

Perubahan ROA menunjukkan perubahan kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang digunakan dalam kegiatan operasi. Semakin besar perubahan ROA menunjukkan semakin besar fluktuasi kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba. Hal ini mempengaruhi investor dalam memprediksi laba dan memprediksi risiko dalam investasi sehingga memberikan dampak pada kepercayaan investor terhadap perusahaan. Sehubungan dengan itu, manajemen termotivasi untuk melakukan praktik perataan laba agar laba yang dilaporkan tidak berfluktuatif sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Dengan demikian, semakin besar perubahan ROA maka semakin besar kemungkinan manajemen melakukan praktik perataan laba.

H2 : Profitabilitas (*Return on Assets*) berpengaruh positif terhadap perataan laba dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

EBTP (*Earning Before Taxes and Provisions*) merupakan variabel laba operasi bersih sebelum pajak dan cadangan bank i pada periode t, dinormalisasi dengan total aset. EBTP menunjukkan kemampuan bank menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya. EBTP digunakan untuk melihat insentif yang dilakukan bank syariah untuk melakukan perataan laba dengan mekanisme PPAP. Menurut Tobing dan Nur (2009), jika bank memiliki kinerja yang bagus di tahun ini dan

memprediksi kinerja yang tidak baik di waktu yang akan datang (*good-poor*), maka manajer bank akan menyimpan laba tahun ini untuk digunakan di waktu yang akan datang dengan cara mengurangi laba melalui peningkatan beban PPAP. Sedangkan jika bank memiliki kinerja yang tidak baik di tahun ini dan memprediksi kinerja yang baik di waktu yang akan datang (*poor-good*), maka bank akan meningkatkan laba tahun ini dengan cara meminjam laba masa depan melalui penurunan beban PPAP. Selain itu, adanya kebutuhan akan pendanaan dari pihak eksternal juga menjadi salah satu faktor bagi manajer bank untuk melakukan praktik perataan laba.

Variabel ini biasanya digunakan dalam literatur sebelumnya sebagai proksi untuk praktek manajemen laba (Boulila, et al., 2010). Hasil penelitian sebelumnya oleh Ahmed, dan Thomas (1999), dan Kanagaretnam, et al. (2003), dan Bouvatier et al. (2006), menunjukkan variabel ini berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Profitabilitas (*Earnings Before Taxes and Provisions*) berpengaruh positif terhadap perataan laba dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Secara konsep teori *Non performing financing* (NPF) merupakan salah satu pengukuran dari rasio risiko usaha bank yang menunjukkan besarnya resiko kredit bermasalah yang ada pada suatu bank (Iqbal dan Abbas, 2007). NPF merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mencegah resiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. NPF mencerminkan resiko kredit, semakin kecil NPF semakin kecil pula resiko kredit yang ditanggung pihak bank. Bank dengan risiko kredit yang tinggi akan memperbesar biaya, baik pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, sehingga berpotensi terhadap

kerugian bank (Mawardi, 2005). Bank dalam memberikan kredit harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Bank melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunan untuk memperkecil resiko kredit (Ali, 2006). Koefisien NPF diharapkan akan menunjukkan pengaruh yang positif terhadap perataan laba.

Penelitian terdahulu yang menguji pengaruh NPF dilakukan oleh Boulila, et al. (2010) yang menguji pengaruh NPF terhadap perataan laba dengan PPAP sebagai proksi, yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa NPF berpengaruh signifikan dan positif terhadap perataan laba bank syariah. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Risiko pembiayaan (*Non performing financing*) berpengaruh positif terhadap perataan laba dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Capital Adequacy Ratio menurut Dendawijaya (2005) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan , surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut di biayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana – dana dari sumber – sumber di luar bank, seperti dana dari masyarakat, pinjaman, dan lain – lain. CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian – kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko.

H5: Modal (*Capital Adequacy Ratio*) berpengaruh positif terhadap perataan laba dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)